

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini dimaksudkan menghasilkan informasi valid dan dapat diandalkan tentang hasil pengujian dari pengaruh rasio gini ekonomi, rasio dosen per lembaga, dan persentase jumlah PT terhadap APK PT di Indonesia pada tahun 2020 – 2022. Penelitian ini mencapai beberapa kesimpulan berdasarkan analisis yang dilakukan, yaitu:

1. Rasio gini ekonomi mempunyai pengaruh secara negatif dan signifikan terhadap APK PT di Indonesia tahun 2020–2022. Dibuktikan hasil angka t-statistik senilai -2,038873 dan angka probabilitas senilai 0,0599 menunjukkan bahwa. Ditunjukkan juga bahwa jika rasio gini mendapat peningkatan senilai 1% dengan anggapan variabel lainnya tetap, dapat terjadi penurunan APK PT sebesar 2,3%.
2. Rasio dosen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap APK PT di Indonesia tahun 2020 – 2022. Dengan hasil nilai pada t-statistik senilai 0.957633 serta angka probabilitas senilai 0.3418. Jika terjadi peningkatan atau penurunan pada rasio dosen tidak akan berpengaruh apapun terhadap APK PT di Indonesia.
3. Rasio jumlah PT tidak berpengaruh secara signifikan terhadap APK PT di Indonesia tahun 2020 – 2022. Dengan angka pada t-statistik senilai - 0.219003 dengan angka probabilitas sebesar 0.8273. Sehingga, apabila

terjadi peningkatan atau penurunan pada rasio jumlah PT tidak akan berpengaruh apapun terhadap APK PT di Indonesia.

5.2. Implikasi

Terdapat beberapa implikasi yang didapatkan pada penelitian ini, yaitu implikasi teoritis dan implikasi praktis. Pada implikasi teoritis, terjadi penekanan pada teori partisipasi pendidikan yang terdiri dari aspek pemerintah, daerah, sekolah dan rumah tangga. Sedangkan, implikasi praktis dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Peningkatan pada rasio gini ekonomi akan mengakibatkan penurunan APK PT. Hal tersebut menandakan bahwa partisipasi pada pendidikan tinggi masih dipengaruhi oleh ketimpangan pengeluaran. Untuk masyarakat yang merasakan ketimpangan, bekerja akan menjadi pilihan yang lebih baik daripada melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan begitu, secara tidak langsung menunjukkan minimnya peran pemerintah dalam mempromosikan bahwa mengeluarkan biaya untuk pendidikan tinggi juga dibutuhkan untuk meningkatkan taraf hidup kedepannya.
2. Peningkatan atau penurunan rasio dosen akan meningkatkan APK PT di Indonesia. Oleh karena itu, persebaran rasio dosen pada setiap provinsi perlu diperhatikan agar tidak terjadinya ketimpangan yang memengaruhi APK.
3. Peningkatan atau penurunan rasio jumlah PT tidak akan berpengaruh terhadap APK PT. Hal tersebut, disebabkan jumlah perguruan tinggi yang

ada pada setiap provinsi dinilai sudah cukup memadai dan mampu menampung mahasiswa yang meneruskan pendidikan ke perguruan tinggi oleh program *merger* atau penggabungan yang dilakukan pemerintah dalam upaya peningkatan APK PT dengan merasionalisasikan jumlah PT yang tersebar di Indonesia dan meningkatkan kualitas PT yang dapat ditunjukkan dari akreditasi yang didapatkan.

5.3. Saran

Dengan mempertimbangkan hasil di atas, peneliti menyarankan hal-hal berikut khususnya untuk pemerintah, yaitu :

1. Pemerintah dapat membuat kebijakan atau program yang dapat menurunkan nilai ketimpangan pengeluaran sehingga masyarakat dapat lebih fokus kepada pendidikan yang juga akan berpengaruh terhadap daya saing Indonesia terhadap negara lain.
2. Persebaran rasio dosen pada yang mengalami *oversupply* seperti pada Provinsi Jawa Barat, Lampung, dan Sulawesi Utara dapat dilakukan pemerataan. Pemerataan dapat dilakukan seperti ke Provinsi Kep. Riau, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Barat.
3. Pemerintah dalam upaya peningkatan APK PT dengan merasionalisasikan jumlah PT yang tersebar di Indonesia dan meningkatkan kualitas PT yang dapat ditunjukkan dari akreditasi yang didapatkan. Seperti kepada provinsi yang mengalami *oversupply* pada Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan

Sulawesi Selatan. Pemerataan dapat dilakukan seperti ke Provinsi Bengkulu, Gorontalo, dan Maluku Utara. Dengan begitu, dapat meningkatkan partisipasi dan pengaruh terhadap APK PT di Indonesia.

5.4. Rekomendasi

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan, yang dapat diteliti lebih lanjut dalam penelitian yang akan datang. Rekomendasi yang dianjurkan yaitu:

1. Penelitian berikutnya bisa menggunakan data dari jumlah provinsi terbaru, seperti pada tahun 2024 sudah ada 38 provinsi. Sedangkan, pada penelitian ini masih menggunakan acuan 34 provinsi pada tahun 2020.
2. Penelitian selanjutnya juga dapat menggabungkan data perguruan tinggi di baah Kementerian Agama, karena pada penelitian ini hanya menggunakan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) seharusnya lebih cepat untuk menggunggah Statistik Pendidikan Tinggi, karena pada saat penelitian di bulan Februari 2024, publikasi yang ada hanya sampai tahun 2022.